



Pemerataan Pembangunan Wilayah: Penilaian Terhadap Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Auza Ghifary¹

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

*) Penulis Korespondensi : ghifaryauza23@gmail.com

Abstract. *The equitable development of the entire region is essential for achieving fair and uniform well-being in the community. This research aims to identify regional development inequality and assess the suitability of the spatial structure plan in the Spatial Planning of Kotawaringin Barat Regency. The study employs a quantitative approach, utilizing scalogram analysis, Marshall centrality index, and regional interaction analysis. Suitability and evaluation are conducted by comparing the analysis results with the spatial structure plan outlined in the Regional Spatial Plan (RTRW) of Kotawaringin Barat Regency. The research findings indicate that: 1) Arut Selatan Sub-district is classified as the order I, serving as the primary urban service center in Kotawaringin Barat Regency with the highest value; 2) there is an unequal distribution of population and facilities across sub-districts, evidenced by the absence of sub-districts meeting order II and III criteria; 3) there is a discrepancy in determining the hierarchy of service center in the spatial structure plan of the RTRW Kotawaringin Barat Regency. Recommendations for the Regency government are to reevaluate the spatial structure plan in the RTRW and improve the distribution of service facilities across the entire region of Kotawaringin Barat Regency.*

Keyword: centrality index, city center, regional interactions, scalogram, spatial planning.

Abstraksi. *Pengembangan wilayah kabupaten yang merata merupakan esensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan pembangunan wilayah dan mengevaluasi kesesuaian rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas Marshall, dan analisis interaksi wilayah. Kesesuaian dan evaluasi dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil analisis dan rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil temuan pada penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kecamatan Arut Selatan menjadi orde I sebagai pusat pelayanan perkotaan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nilai tertinggi; 2) terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi penduduk dan fasilitas di seluruh wilayah kecamatan, terbukti dengan tidak adanya kecamatan yang memenuhi kriteria orde II dan III; 3) terdapat ketidaksesuaian antara penentuan hierarki pusat pelayanan dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ialah perlu melakukan kajian ulang terkait rencana struktur ruang dalam RTRW dan meningkatkan distribusi fasilitas pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.*

Kata kunci: indeks sentralitas, interaksi wilayah, pusat pelayanan, RTRW, skalogram.

diunggah: Januari 2024; direvisi: September 2024; disetujui: November 2024

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Ghifary, Auza (2024). Pemerataan Pembangunan Wilayah: Penilaian Terhadap Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(2), 229-244. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i2.482>

PENDAHULUAN

Struktur Ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang mencakup di dalamnya pemetaan dan pengembangan pusat-pusat permukiman yang memiliki keterkaitan hierarkis dan hubungan fungsional dalam jaringan infrastruktur wilayah perkotaan (Wansaga et al., 2020). Salah satu aspek penting dalam penataan ruang adalah penentuan hierarki pusat pelayanan, di mana pusat pelayanan tertinggi memiliki daya tarik yang besar bagi daerah sekitarnya. Kondisi ini memicu aglomerasi wilayah yang saling terkait dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan wilayah (Muliana et al., 2018).

Pengembangan wilayah merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Muta'ali, 2015). Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional adalah pengurangan ketimpangan antar wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Ketimpangan antar wilayah ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah tertentu (Kusuma & Muta'ali, 2019). Ketimpangan dalam pembangunan wilayah menjadi hambatan signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan salah satu indikator utamanya adalah ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan publik (Ancok & Nurhadi, 2018).

Penelitian Sugiastuti & Pratama (2022), menunjukkan bahwa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pemerataan pelayanan publik, terutama yang berfokus pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, harus menjadi perhatian utama. Pelayanan publik yang berkualitas dan dijamin oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, terutama dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan dalam hal ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalamnya. Meskipun berpotensi menjadi motor ekonomi bagi kabupaten sekitarnya, kesenjangan dalam distribusi fasilitas publik, terutama infrastruktur dasar dan ekonomi, masih menjadi perhatian utama (Putra et al. 2020). Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan wilayah secara merata, tetapi juga berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-2024 menargetkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur sebagai salah satu misi utama dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Di sisi lain, dengan adanya pemindahan ibukota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur juga menjadi isu penting di mana tujuan pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan adalah untuk meminimalkan ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia serta memberikan peluang pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi bagi

masyarakat adat (Ayyubi et al., 2023; Sari & Fadillah, 2022). Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berpotensi akan mempengaruhi keberhasilan tujuan pemerataan pembangunan serta cita – cita pemindahan ibukota negara di Kalimantan.

Dokumen perencanaan tata ruang memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang diatur secara terbatas dan jelas agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang (I. M. Putra, 2023). Menurut Andrianto & Iskandar (2019), adanya intervensi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan dan ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2037 sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah tentu memiliki peranan untuk menegaskan pengaturan pemanfaatan ruang dan kontrol terhadap penggunaannya di seluruh wilayah kabupaten sehingga diharapkan mampu menciptakan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pengembangan antar wilayah.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, penting untuk mengevaluasi rencana struktur ruang guna memastikan bahwa pengembangan wilayah berjalan secara seimbang dan terarah. Ketimpangan distribusi fasilitas publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, dapat menghambat pertumbuhan yang inklusif dan merata. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: "Bagaimana kesesuaian rencana struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Barat jika dilihat dari distribusi fasilitas publik yang ada?" Pertanyaan ini berakar dari kebutuhan untuk mengevaluasi seberapa jauh kebijakan RTRW saat ini dapat mengatasi ketimpangan dalam distribusi fasilitas publik di seluruh wilayah kabupaten.

Studi sebelumnya, penelitian Mokodongan et al (2019) melakukan evaluasi kesesuaian RTRW Kotamobagu dengan melakukan perhitungan persentase tingkat kesesuaian RTRW dengan kondisi aktual menggunakan pedoman Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. Beberapa penelitian lain, Apriana & Rudiarto, (2020) dan Devi et al. (2023) menggunakan analisis skalogram, indeks sentralitas Marshall dan nilai interaksi wilayah dengan model gravitasi yang bertujuan untuk menentukan pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi metode yang digunakan penelitian sebelumnya untuk mengevaluasi kesesuaian rencana struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan jumlah dan distribusi fasilitas pelayanan publik dan nilai interaksi wilayah serta memberikan rekomendasi pusat kegiatan baru untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah melihat kesesuaian rencana struktur ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengidentifikasi indikasi ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi dalam distribusi fasilitas pelayanan publik di seluruh kecamatan. Berdasarkan penelitian Mokodongan et al. (2019) & Muliana et al. (2018), apabila ditemukan kesenjangan dan ketidaksesuaian antara kebijakan RTRW dengan kondisi

aktual maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang, merumuskan kembali kebijakan dan strategi baru untuk perbaikan perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang serta perlu dilakukan peninjauan kembali dan revisi dokumen RTRW. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah dengan melihat konteks bahwa RPJMN 2020-2024 menyebutkan pengurangan ketimpangan antar wilayah sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kalimantan Tengah, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, terutama sebagai pendukung pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penelitian ini relevan secara nasional untuk memberikan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan tata ruang di wilayah lain di Pulau Kalimantan yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mendukung kebijakan pemerataan pembangunan melalui kebijakan tata ruang, tidak hanya di Kotawaringin Barat tetapi juga di wilayah – wilayah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif, menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur secara statistik atau dari sebuah pengukuran (Jaya, 2020). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2023 oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode pengumpulan data dilakukan berdasarkan telaah pustaka dan studi dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama adalah mengumpulkan data-data sekunder jumlah fasilitas-fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, tempat ibadah dan perdagangan yang tersedia. Kedua, mengelompokkan data yang telah dikumpulkan menggunakan metode *goodenough* untuk dilakukan perhitungan dengan analisis skalogram untuk menentukan orde-orde pusat permukiman. Ketiga, melakukan perhitungan indeks sentralitas Marshall untuk menentukan orde-orde pusat permukiman berdasarkan bobot dari setiap unit fasilitas. Keempat, menghitung nilai interaksi wilayah untuk memperkirakan nilai daya tarik pusat pertumbuhan dengan daerah sekitarnya berdasarkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Alat analisis ini digunakan untuk menentukan pusat dan sub pusat pelayanan daerah berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang tersedia (Apriana & Rudiarto, 2020). Selanjutnya, interpretasi hasil ketiga analisis tersebut untuk mengevaluasi distribusi fasilitas layanan publik dan keterkaitan antar wilayah serta melihat indikasi kesenjangan antar wilayah dilihat dari distribusi fasilitas layanan publik. Terakhir, melakukan perbandingan hasil analisis dengan rencana struktur ruang RTRW untuk melihat ketidaksesuaian rencana struktur ruang yang ada dengan distribusi fasilitas layanan publik.

Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk mengelompokkan pusat-pusat permukiman menjadi orde-orde pusat permukiman berdasarkan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada di suatu wilayah dan menjadi penentu pusat permukiman tersebut sebagai pusat pertumbuhan (Muliana et al., 2018). Salah satu teknik yang digunakan penulis dalam langkah penyusunan skala Guttman adalah menggunakan metode *goodenough*. Metode ini digunakan untuk menghitung *error* yang ada pada matriks skala Guttman, yaitu fasilitas yang tersedia atau memiliki nilai 1 (satu) diurutkan dan diletakkan pada baris yang paling kiri terlebih dahulu, kemudian menentukan pola prediksi ideal pada masing-masing nilai total fasilitas di setiap kecamatan untuk memudahkan perhitungan *error*. Persamaan/rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) Menguji kelayakan skalogram menggunakan rumus *Coeffisien of Reproductibility* (COR), apabila nilai COR bernilai 0,9 – 1 maka koefisien dapat dianggap layak.

$$CR = 1 - \frac{\Sigma e}{N \cdot K} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

e = jumlah *error*

N = jumlah kecamatan yang diteliti

K = jumlah fasilitas yang diteliti

- b) Menentukan jumlah orde untuk kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Orde} = 1 + (3,3 \times \log n) \dots\dots\dots (2)$$

n = jumlah kecamatan

- c) Menentukan besaran *range*/panjang interval masing-masing orde dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Range} = \frac{\text{Jumlah tertinggi} - \text{jumlah terendah}}{\text{Orde}} \dots\dots\dots (3)$$

Indeks Sentralitas Marshall

Analisis indeks sentralitas Marshall pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama dengan analisis skalogram yaitu mengelompokkan pusat-pusat permukiman menjadi orde-orde pusat permukiman. Perbedaannya adalah indeks sentralitas Marshall memperhitungkan banyaknya unit fasilitas pelayanan, sehingga asumsi yang digunakan adalah wilayah yang memiliki unit fasilitas pelayanan terbanyak merupakan orde tertinggi dan ditetapkan sebagai pusat pelayanan (Apriana & Rudiarto, 2020). Tahapan dan persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a) Menghitung bobot dari setiap unit fasilitas di masing-masing kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$N = \frac{100}{C} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

N = Bobot dari setiap unit fasilitas

C = Jumlah seluruh unit fasilitas

100 = Asumsi nilai sentralitas

- b) Menghitung Indeks Sentralitas setiap unit fasilitas di masing-masing kecamatan, dengan menggunakan rumus.

$$IS = N \times y \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

IS = Indeks Sentralitas

N = bobot dari setiap unit fasilitas

y = jumlah unit fasilitas di masing-masing kecamatan

- c) Menghitung jumlah kelas/orde (K) dengan menggunakan rumus.

$$K = 1 + (3,3 \times \log n) \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

K = Jumlah kelas

n = Jumlah kecamatan

- d) Menghitung panjang interval/*range* masing-masing kelas/orde menggunakan rumus.

$$I = \frac{T-t}{K} \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan :

I = Panjang interval kelas

T = Jumlah kecamatan yang dianalisis

t = Jumlah kecamatan yang dianalisis

K = Jumlah kelas

Nilai Interaksi Wilayah

Nilai interaksi wilayah digunakan untuk memperkirakan nilai interaksi atau daya tarik suatu pusat pertumbuhan pada suatu wilayah dengan lokasi di sekitarnya (*hinterland*). Nilai interaksi wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$NI_{ab} = K \frac{P_a \times P_b}{(d_{ab})^2} \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan:

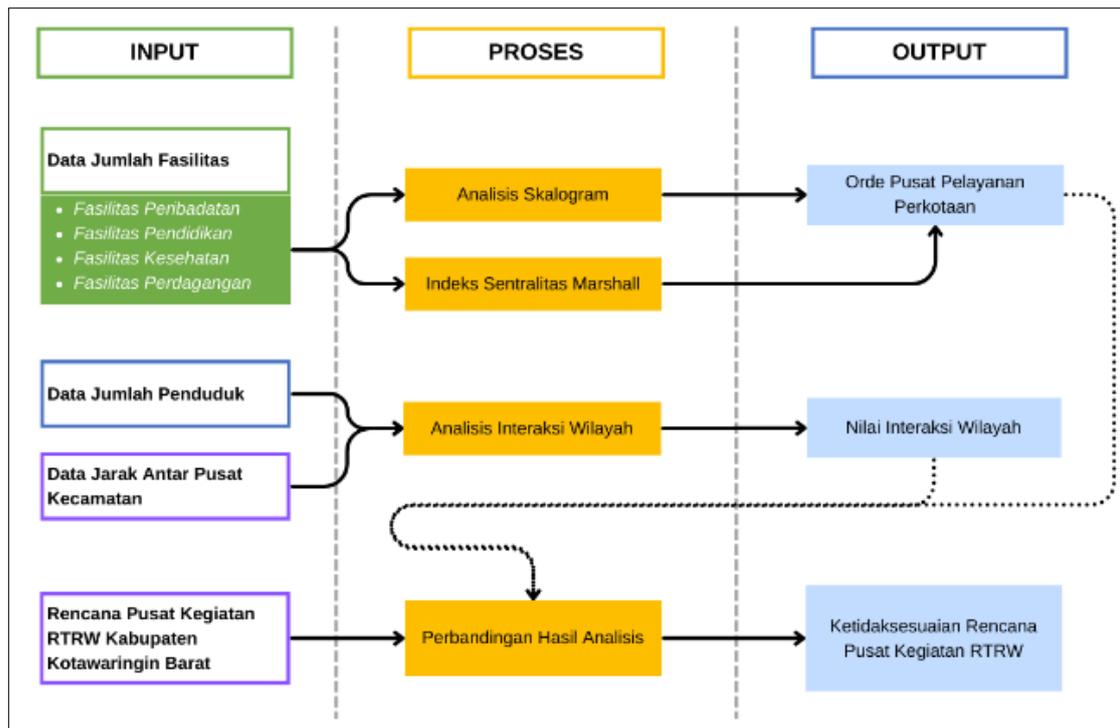
NI_{ab} = Nilai Interaksi wilayah a dengan b

P_a = Jumlah penduduk wilayah a (jiwa)

P_b = Jumlah penduduk wilayah b (jiwa)

d_{ab} = Jarak dari wilayah a dengan wilayah b (km)

K = Konstanta empiris (bernilai 1)



Gambar 1. Diagram Proses Analisis
 Sumber: Penulis, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orde Pusat Pelayanan Berdasarkan Skalogram

Berdasarkan kelengkapan fasilitas yang ada di 6 kecamatan didapatkan 4 orde kecamatan, penentuan interval tiap orde disajikan pada Tabel 1 dan hasil perhitungan analisa skalogram dijabarkan pada Tabel 2. Diketahui jumlah *error* = 10 maka didapatkan nilai COR = 0,931, artinya data fasilitas yang digunakan dalam perhitungan skalogram ini layak untuk digunakan dan dilanjutkan pada penentuan orde tiap kecamatan.

Berdasarkan Tabel 2, didapatkan Kecamatan Arut Selatan menduduki orde I yang artinya kecamatan ini memiliki fasilitas yang paling lengkap. Kecamatan yang berada di orde III yaitu Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, dan Kecamatan Pangkalan Lada dengan fasilitas yang tidak dimiliki tidak selengkap kecamatan pada orde I.

Tabel 1.
 Interval Orde Kecamatan Skalogram

Interval Orde	Orde Kecamatan
22,2 - 24,2	I
20,1 - 22,1	II
18,0 - 20,0	III
15,9 - 17,9	IV

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Kecamatan Arut Utara merupakan kecamatan yang memiliki fasilitas paling tidak lengkap dibandingkan orde I dan III. Penentuan untuk wilayah kecamatan yang berada

pada orde II tidak dapat muncul karena tidak ada kecamatan yang memiliki nilai rentang sesuai dengan interval orde II sesuai Tabel 1.

Tabel 2.
 Hasil Perhitungan Analisis Skalogram

Kecamatan	Fasilitas															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Arut Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pangkalan Banteng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kotawaringin Lama	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kumai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pangkalan Lada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arut Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Jumlah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5

Kecamatan	Fasilitas									Jumlah	Error	Orde
	17	18	19	20	21	22	23	24				
Arut Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0	I
Pangkalan Banteng	1	1	1	1	0	0	0	0	0	20	0	III
Kotawaringin Lama	1	1	1	0	1	0	0	0	0	20	2	III
Kumai	1	0	1	1	0	0	0	0	0	19	2	III
Pangkalan Lada	1	1	0	0	0	0	0	0	0	18	0	III
Arut Utara	0	1	0	0	1	1	0	0	0	16	6	IV
Jumlah	5	5	4	4	3	3	1	1	1	121	10	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

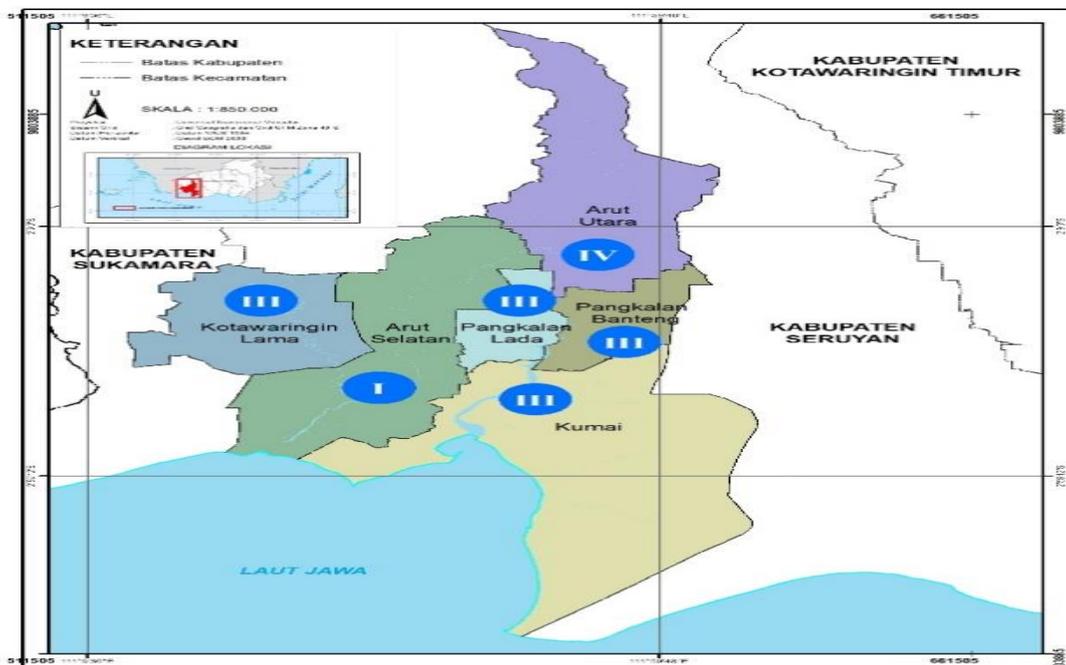
Keterangan:

- = error
- 1 = TK
- 2 = SD
- 3 = SMP
- 4 = SMA Sederajat
- 5 = Klinik Pratama
- 6 = Puskesmas
- 7 = Puskesmas Pembantu
- 8 = Posyandu
- 9 = Masjid
- 10 = Mushola
- 11 = Gereja Protestan
- 12 = Pasar
- 13 = Minimarket/Pertokoan
- 14 = Rumah Makan/Restoran
- 15 = MTs
- 16 = SMK
- 17 = MA

- 18 = Gereja Katholik
- 19 = RA
- 20 = MI
- 21 = Pura
- 22 = Vihara
- 23 = Perguruan Tinggi
- 24 = Rumah Sakit

Jika dilihat dari jumlah ketersediaan fasilitas, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki nilai sama yaitu 20, dibandingkan dengan interval orde hasil perhitungan skalogram nilai ini nyaris masuk pada orde II. Kedua kecamatan ini sangat berpotensi dikembangkan menjadi pusat pelayanan yang lebih tinggi karena ada peluang penambahan fasilitas khususnya fasilitas peribadatan (pura dan vihara), fasilitas kesehatan (rumah sakit) dan fasilitas pendidikan (MI dan perguruan tinggi). Gambar 1 memberikan visualisasi orde pusat pelayanan perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisis skalogram.

Setiap orde kecamatan dalam analisis ini memiliki perbedaan fasilitas yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Fasilitas yang menjadi pembeda antara orde I dibanding orde III dan IV adalah ketiadaan beberapa fasilitas penting seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah), pura dan klenteng, serta perguruan tinggi dan rumah sakit.



Gambar 1. Peta Orde Pusat Pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Analisis Skalogram

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

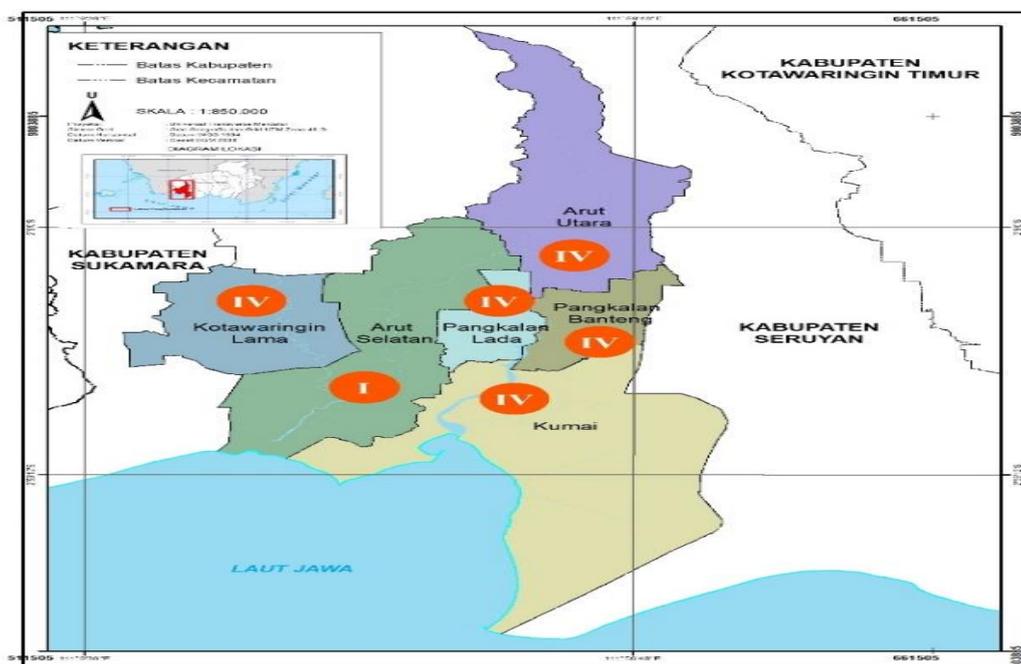
Sesuai dengan penelitian Ancok & Nurhadi (2018) dan Rahman et al. (2020), tidak tersedianya fasilitas publik ini dapat menjadi indikasi bahwa ada ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dalam pemenuhan

fasilitas-fasilitas tersebut. Hal ini diperkuat dari hasil perhitungan skalogram yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak ada kecamatan yang berada pada orde ke 2 dalam hierarki pusat pelayanan perkotaan.

Orde Kecamatan Berdasarkan Indeks Sentralitas Marshall

Berdasarkan penentuan orde ISM pada Tabel 3 didapatkan bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki nilai indeks sentralitas tertinggi dengan nilai 1.059,32. Nilai tersebut menandakan bahwa Kecamatan Arut Selatan masuk ke dalam orde I. Penghitungan untuk wilayah yang mendapatkan posisi orde II dan orde III tidak dapat muncul karena tidak ada kecamatan yang memiliki nilai rentang sesuai dengan interval orde II dan orde III. Oleh karena itu, kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Kotawaringin Lama berada pada orde IV. Visualisasi orde perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisis indeks sentralitas Marshall terdapat pada Gambar 2.

Hasil analisis indeks sentralitas Marshall menggambarkan posisi setiap kecamatan dalam struktur perkotaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Temuan signifikan terlihat dominasi Kecamatan Arut Selatan sebagai pusat perkotaan utama dengan nilai indeks sentralitas tertinggi, menandakan jumlah penduduk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia mampu melayani penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.



Gambar 2. Peta Orde Pusat Pelayanan di Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Analisis ISM

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Namun, ketimpangan terlihat secara signifikan karena tidak ada kecamatan yang memenuhi rentang orde II dan III. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi ketimpangan distribusi penduduk dan fasilitas antara kecamatan yang memiliki orde I dengan

kecamatan orde di bawahnya. Mayoritas kecamatan, seperti Kumai, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara, terletak pada orde IV, menunjukkan posisi sentralitas yang lebih rendah dibandingkan Kecamatan Arut Selatan.

Temuan ini menyoroti keterbatasan struktur perkotaan yang tidak merata di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu upaya pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih terfokus untuk memastikan pemerataan distribusi fasilitas pelayanan publik di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejalan dengan penelitian Hulu & Wahyuni (2021) dan Pratiwi et al. (2023), bahwa pemerataan pembangunan melalui pembangunan dan distribusi infrastruktur menjadi aspek penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Indeks Sentralitas Marshall

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Total Fasilitas	Nilai ISM	Interval Orde	Orde
Arut Selatan	119.988	809	1.051,63	838,4 – 1051,9	I
Pangkalan Banteng	38.235	353	329,27	197,3 – 410,9	IV
Kotawaringin Lama	19.319	211	263,09	197,3 – 410,9	IV
Kumai	53.054	362	360,75	197,3 – 410,9	IV
Pangkalan Lada	34.964	277	197,35	197,3 – 410,9	IV
Arut Utara	9.365	119	197,92	197,3 – 410,9	IV

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Analisis Interaksi Wilayah

Perhitungan interaksi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk menilai seberapa besar faktor jarak dan jumlah penduduk menjadi daya tarik antar lokasi wilayah dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam proses perhitungannya, analisis ini mempertimbangkan jarak rata-rata dalam kilometer antara pusat kecamatan (Kantor Kecamatan) menuju pusat kecamatan lainnya melalui akses jalan utama yang biasa dilalui penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Tabel 4 terlihat perbedaan besar nilai interaksi antara beberapa pasang kecamatan. Sebagai contoh, Kecamatan Arut Selatan menunjukkan nilai interaksi yang sangat tinggi terutama dalam hubungannya dengan Kecamatan Kumai yaitu sebesar 28.292.637,12, sementara nilai interaksi dengan Kecamatan Arut Utara relatif rendah yaitu sebesar 100.007,80. Hal ini menandakan bahwa ada tingkat keterkaitan yang kuat dalam hal kegiatan ekonomi dan sosial antara Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai diperkuat juga dengan jarak yang relatif lebih dekat dibanding dengan kecamatan lainnya. Sebuah wilayah dapat menjadi pusat yang vital disebabkan tersedianya fasilitas yang komprehensif dan kegiatan layanan publik, yang mendorong penduduk untuk banyak berinteraksi dengan kecamatan (Shara, 2018). Nilai interaksi yang tinggi di Kecamatan Arut Selatan tidak terlepas dari statusnya sebagai kecamatan dengan orde I.

Tabel 4.
 Hasil Perhitungan Nilai Interaksi (NI) Antar Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jarak (km)	Interaksi Antar Kecamatan	Nilai Interaksi Total
	Pa	Pb			
Arut Selatan	Pangkalan Banteng	119.988	38.235	66	1.053.200,45
	Kotawaringin Lama	119.988	19.319	45	1.144.715,15
	Kumai	119.988	53.054	15	28.292.637,12
	Pangkalan Lada	119.988	34.964	38	2.905.305,01
	Arut Utara	119.988	9.365	106	100.007,80
Pangkalan Banteng	Arut Selatan	38.235	119.988	66	1.053.200,45
	Kotawaringin Lama	38.235	19.319	111	59.951,46
	Kumai	38.235	53.054	81	309.178,43
	Pangkalan Lada	38.235	34.964	31	1.391.101,50
	Arut Utara	38.235	9.365	40	223.794,23
Kotawaringin Lama	Arut Selatan	19.319	119.988	45	1.144.715,15
	Pangkalan Banteng	19.319	38.235	111	59.951,46
	Kumai	19.319	53.054	60	284.708,40
	Pangkalan Lada	19.319	34.964	83	98.050,45
	Arut Utara	19.319	9.365	151	7.934,85
Kumai	Arut Selatan	53.054	119.988	15	28.292.637,12
	Pangkalan Banteng	53.054	38.235	81	309.178,43
	Kotawaringin Lama	53.054	19.319	60	284.708,40
	Pangkalan Lada	53.054	34.964	53	660.370,26
	Arut Utara	53.054	9.365	121	33.935,57
Pangkalan Lada	Arut Selatan	34.964	119.988	38	2.905.305,01
	Pangkalan Banteng	34.964	38.235	31	1.391.101,50
	Kotawaringin Lama	34.964	19.319	83	98.050,45
	Kumai	34.964	53.054	53	660.370,26

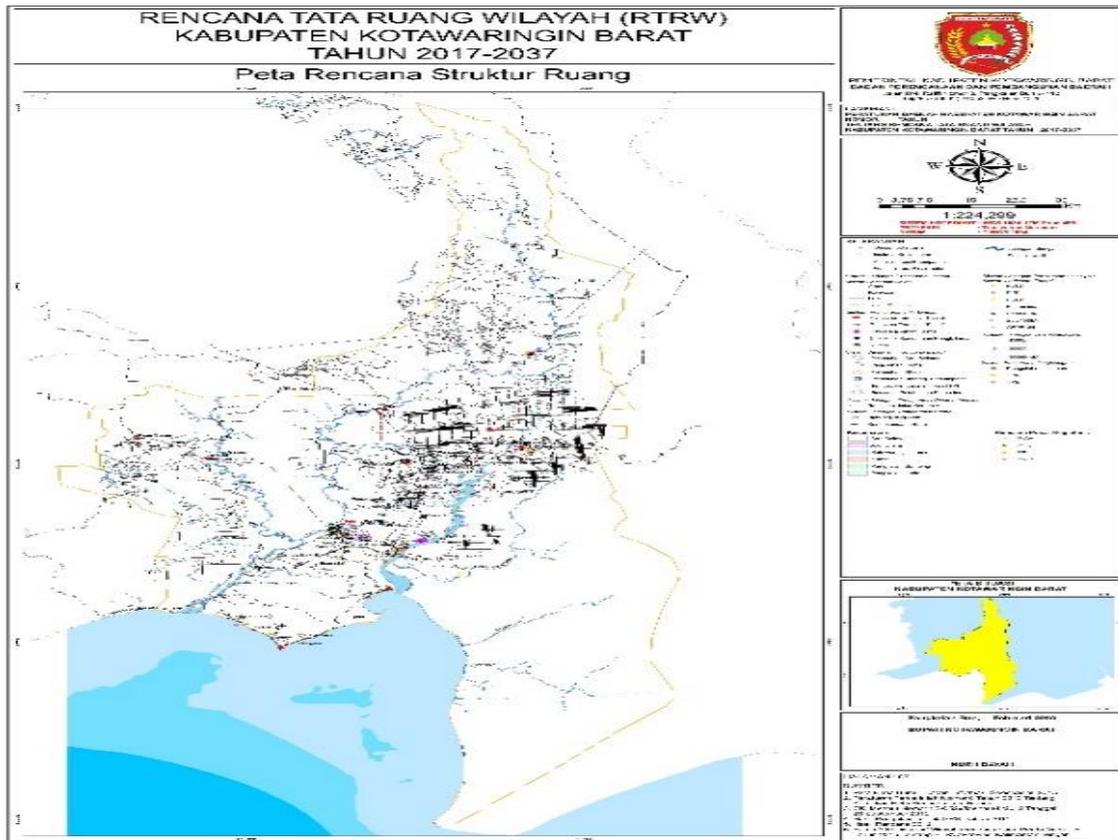
Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jarak (km)	Interaksi Antar Kecamatan	Nilai Interaksi Total
	Pa	Pb			
Arut Utara	34.964	9.365	71	64.954,94	
Arut Selatan	9.365	119.988	106	100.007,80	
Pangkalan Banteng	9.365	38.235	40	223.794,23	
Arut Utara Kotawaringin Lama	9.365	19.319	151	7.934,85	430.627,39
Kumai	9.365	53.054	121	33.935,57	
Pangkalan Lada	9.365	34.964	71	64.954,94	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Di sisi lain, terdapat kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas tinggi namun memiliki nilai interaksi yang rendah terdapat pada Kecamatan Pangkalan Banteng. Berdasarkan Tabel 3, Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki jumlah fasilitas 353 sedangkan nilai interaksi hanya sebesar 3.037.226,08. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi di Kecamatan Kumai yang memiliki jumlah fasilitas sebanyak 362 dan memiliki nilai interaksi sebesar 29.580.829,78. Hal ini menandakan bahwa kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas yang banyak bisa jadi memiliki nilai interaksi yang rendah begitu pun sebaliknya, dikarenakan jarak dan akses antar kecamatan yang relatif jauh. Namun, tingginya nilai interaksi menunjukkan bahwa Kecamatan Kumai berpotensi dijadikan sebagai pusat kegiatan orde II jika dilihat dari faktor kedekatan jarak dengan Kecamatan Arut Selatan. Sejalan dengan penelitian Agustina et al. (2021) dan Devi et al. (2023) yang menyatakan bahwa faktor jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan dapat mempengaruhi nilai interaksi kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbandingan Hasil Analisis dengan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat

Jika dilihat pada rencana struktur ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, terlihat perbedaan penentuan orde pusat pelayanan dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall. Tabel 5 mengungkap perbedaan yang signifikan dalam penentuan pusat-pusat kegiatan dan hierarki pelayanan. RTRW menetapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Pangkalan Bun yang merupakan bagian dari Kecamatan Arut Selatan sebagai orde tertinggi, sementara hasil skalogram menempatkan Kecamatan Arut Selatan sebagai orde I. Di sisi lain, indeks sentralitas Marshall juga memberikan konfirmasi Kecamatan Arut Selatan sebagai orde I. Hasil kedua analisis ini masih sejalan dengan RTRW.



Gambar 3. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037

Lain hal dengan kondisinya dengan Kecamatan Kumai yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang RTRW sebagai sebagai orde kedua, yaitu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). Sementara hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, Kecamatan Kumai tidak teridentifikasi sebagai orde II atau Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagaimana yang diharapkan oleh RTRW.

Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) dalam RTRW diarahkan pada sejumlah kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Utara. Penentuan PPK ini telah sesuai dengan hasil analisis skalogram yang menempatkan kecamatan-kecamatan tersebut ke dalam orde III. Namun hal berbeda ditunjukkan dari hasil analisis indeks sentralitas Marshall yang menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai PPK dalam RTRW tersebut tidak termasuk ke dalam orde III sehingga rencana struktur ruang tersebut belum sesuai dengan hierarki yang diinginkan.

Selain itu, RTRW menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di seluruh desa sebagai orde IV, sementara hasil analisis skalogram tidak mengidentifikasi PPL atau orde IV. Hasil analisis indeks sentralitas Marshall menunjukkan bahwa adanya penurunan orde pada Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Utara yang ditetapkan sebagai orde IV, yang sebelumnya ditetapkan sebagai orde III pada RTRW dan hasil analisis skalogram.

Hasil analisis interaksi wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki nilai interaksi paling tinggi sehingga kecamatan ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Kabupaten dan melayani kecamatan-kecamatan lainnya sebagai daerah *hinterland*-nya. Kecamatan Kumai memiliki nilai interaksi total lebih kecil daripada Kecamatan Arut Selatan dan berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan baru bagi daerah sekitarnya. Jika dilihat dari jarak dengan pusat kecamatan lainnya yang relatif jauh dan lokasi spasial kurang strategis, Kecamatan Kumai tidak layak dijadikan pusat kegiatan baru. Sejalan dengan penelitian Soares et al. (2017), bahwa pengembangan pusat kegiatan baru perlu mempertimbangkan jarak dan lokasi. Jika dilihat dari aspek jarak dan lokasi pada nilai interaksi wilayah, maka Kecamatan Pangkalan Banteng layak dijadikan pusat kegiatan baru karena memiliki jumlah fasilitas lengkap untuk melayani Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Arut Utara serta jarak dan lokasi yang relatif dekat dengan dua daerah *hinterland* tersebut dan memiliki nilai interaksi yang cukup kuat dengan Kecamatan Arut Selatan sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbandingan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan pusat kegiatan dan hierarki pelayanan antara RTRW dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan rencana struktur ruang dalam RTRW. Selain itu, menurut Tuar et al. (2021) pemerintah perlu terus memantau dan menilai kualitas dan kuantitas fasilitas yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan penyesuaian secara tepat terhadap kebijakan RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dengan mempertimbangkan penyediaan fasilitas-fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah serta mengembangkan pusat kegiatan baru yang memperhatikan jarak dan lokasi kecamatan agar dapat melayani daerah sekitar sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Soares et al., 2017).

Tabel 5.

Perbandingan Hierarki Rencana Pusat Kegiatan dalam RTRW dan Hasil Analisis						
RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037			Skalogram		Indeks Sentralitas Marshall	
Rencana Pusat Kegiatan	Kecamatan		Orde	Kecamatan	Orde	Kecamatan
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	Perkotaan Pangkalan Bun (Kecamatan Arut Selatan)		I	Kecamatan Arut Selatan	I	Kecamatan Arut Selatan
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)	Perkotaan Kecamatan Kumai		II	-	II	-
PPK (Pusat Kegiatan Kawasan)	- Kecamatan Pangkalan Banteng		III	- Kecamatan Kumai	III	-

RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037		Skalogram		Indeks Sentralitas Marshall	
Rencana Pusat Kegiatan	Kecamatan	Orde	Kecamatan	Orde	Kecamatan
	- Kecamatan Pangkalan Lada		- Kecamatan Pangkalan Banteng		
	- Kecamatan Kotawaringin Lama		- Kecamatan Pangkalan Lada		
	- Kecamatan Arut Utara		- Kecamatan Kotawaringin Lama		
			- Kecamatan Arut Utara		
PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	PPL di seluruh desa	IV	-	IV	- Kecamatan Kumai - Kecamatan Pangkalan Banteng - Kecamatan Pangkalan Lada - Kecamatan Kotawaringin Lama - Kecamatan Arut Utara

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Arut Selatan merupakan pusat pelayanan perkotaan utama di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall yang menunjukkan bahwa Kecamatan Arut Selatan memiliki nilai tertinggi dalam kedua analisis tersebut. Berdasarkan perhitungan nilai interaksi wilayah, Kecamatan Arut Selatan pun memiliki nilai tertinggi yang berarti bahwa kecamatan ini cenderung menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam nilai interaksi wilayah pada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Hal ini juga dapat menjadi indikasi adanya ketimpangan dari segi akses dalam mencapai fasilitas-fasilitas publik. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam penentuan pusat kegiatan dan hierarki pelayanan antara RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, terlihat dari tidak adanya kecamatan yang memenuhi kriteria orde II dan orde III.

Terdapat indikasi ketimpangan berupa ketimpangan antara pusat dan daerah sekitarnya (*hinterland*) dalam distribusi fasilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat, terlihat dari adanya kecamatan yang tidak tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan perencanaan pengembangan yang lebih terfokus untuk memastikan distribusi pelayanan publik dan fasilitas yang merata di seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian adalah 1) pemerintah perlu melakukan kajian ulang terkait rencana struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan distribusi fasilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menjadikan Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai pusat kegiatan baru.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan secara merata dan adil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saran yang menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan distribusi fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian, akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih terarah sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi dan dengan sumber daya yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi kesenjangan distribusi fasilitas publik

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S., Valeriani, D., & Yunita, A. (2021). The development of growth centres and hinterland areas in Bangka Regency , Indonesia. *Journal of Social, Humanity, and Education (JSHE)*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jshe.v2i1.712>
- Ancok, Z. W., & Nurhadi. (2018). Kajian pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Klaten. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 16(1), 13–24. <https://doi.org/10.5422/fordham/9780823284221.003.0007>
- Andrianto, I., & Iskandar, D. A. (2019). Program Pembangunan Dalam Konvergensi/Divergensi Wilayah. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.101>
- Apriana, M., & Rudiarto, I. (2020). Penentuan Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Tanjungpinang. *Tunas Geografi*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24114/tgeo.v9i1.17217>
- Ayyubi, M., Perwira, I., & Abdurrahman, A. (2023). The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 140–158. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i2.16298>
- Devi, I. M., Yunitasari, D., Priyono, T. H., Mahardiyanto, A., Fitri, R. N., & Somaji, R. P. (2023). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Wilayah

- Kabupaten Blitar. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 98–107.
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019*, 603–612.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (F. Husaini (ed.); Edisi I). Anak Hebat Indonesia.
- Kusuma, M. E., & Muta'ali, L. (2019). Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia. *Jurnal Bumi Indonesia*.
- Mokodongan, R. P., Rondowunu, D. M., & Moniaga, I. L. (2019). Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 - 2034. *Jurnal Spasial*, 6(1), 68–77.
- Muliana, R., Astuti, P., & Fadli, A. (2018). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Saintis*, 18(1), 59–72. [https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18\(1\).2846](https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18(1).2846)
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).
- Pratiwi, D., Althafah, N., & Khatammi, S. (2023). Kontra: Pemerataan Pembangunan Harus Berbasis Proporsional Berdasarkan Jumlah Penduduk Suatu Wilayah. *Pro Kontra Isu Pembangunan*, 1(July), 69–74.
- Putra, D. A. W., Rusda, D., & Aziz, A. (2020). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan (Growth Pole) dan Wilayah Belakang (Hinterland) Provinsi Kalimantan Tengah. *Ecoplan: Journal of Economics and Development Studies*, 3(2), 105–118.
- Putra, I. M. (2023). *Pengembangan Wilayah* (R. Rubino (ed.); Edisi Pert). CV. Prokreatif.
- Rahman, F., Astagini, A., Dellan, A., & Effendy, F. (2020). Kesenjangan Pembangunan di Tingkat Lokal : Refleksi Atas Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 93–111. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.422>
- Sari, C. F., & Fadillah, Z. N. (2022). Implications for the Development of the National Capital of the Archipelago and Protection of Customary Law Communities: A Review of Law Number 3 of 2022. *Arkus*, 10(3), 566–572. <https://doi.org/10.37275/arkus.v10i3.546>
- Shara, A. R. I. D. (2018). Analisis Konektivitas Wilayah di Kota Denpasar. *Media Komunikasi Geografi*, 19(1), 42. <https://doi.org/10.23887/mkg.v19i1.13811>
- Soares, L., Rustiadi, E., & Mulatsih, S. (2017). Analisis Disparitas dan Interaksi Spasial di Timor-Leste. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 74–86. <https://doi.org/10.29244/jrp2wd.2017.1.1.74-86>
- Sugiasuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90. <https://profit.ub.ac.id>
- Tuar, I. G., Sela, R. L. E., & Lakat, R. S. M. (2021). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Kota Tomohon Berdasarkan Hirarki. *Spasial*, 8(1), 2442–3262.
- Wansaga, N. A., Tondobala, L., & Wuisang, C. (2020). Analisis Hirarki Pusat –Pusat Kegiatan Di Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 7(2), 195–207.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.